

PERTUMBUHAN EKONOMI TANPA KENAIKAN KESEJAHTERAAN

Mengapa Bisa Terjadi?

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
IBM-ASMI

www.rudycr.com/cv.pdf

RudyCT Academic Series 2026



ARTIKEL AKADEMIK

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Kenaikan Kesejahteraan: Mengapa Bisa Terjadi?

Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjadi kesejahteraan
jika manfaatnya tidak tersebar luas.



1 PDB
tumbuh
Ekonomi
bertambah besar.



2 Upah riil
tertahan
Kenaikan upah
tidak sebanding
dengan produktivitas
dan inflasi.



3 Biaya hidup
meningkat
Pangan, transportasi,
pendidikan, kesehatan,
dan perumahan
semakin mahal.



4 Pekerjaan
rentan masih
tinggi
Pekerjaan informal
dan tidak tetap
mendominasi.



5 Ketimpangan
aset melebar
Kekayaan terkonsentrasi,
kesenjangan pendapatan
semakin besar.



6 Layanan publik
belum merata
Akses pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur dasar masih
 timpang antardaerah.



Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudycct.com/cv.pdf



IBM-ASMI



Pertumbuhan ekonomi penting,
namun pemerataan manfaat
adalah kunci kesejahteraan bangsa.
Indonesia maju, bila manfaat dirasakan semua.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi sering diperlakukan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Namun kenaikan produk domestik bruto tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. PDB dapat tumbuh sementara upah riil stagnan, pekerjaan yang tercipta bersifat informal dan rentan, biaya perumahan serta pangan meningkat, layanan publik tetap timpang, dan keuntungan produktivitas terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi atau pemilik aset. Artikel ini menjelaskan secara naratif dan komprehensif mengapa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa kenaikan kesejahteraan yang sepadan. Analisis memisahkan ukuran produksi dari ukuran distribusi, keamanan ekonomi, kualitas hidup, dan kemampuan warga mengubah pendapatan menjadi kehidupan yang layak. Pembahasan mencakup pertumbuhan yang padat modal, deindustrialisasi dini, dualisme pasar kerja, upah dan produktivitas, inflasi menurut kelompok pengeluaran, kemiskinan rentan, ketimpangan aset, ketimpangan wilayah, kualitas pendidikan dan kesehatan, perumahan, lingkungan, kerja perawatan, serta kelemahan tata kelola. Dalam konteks Indonesia, data resmi menunjukkan bahwa ekonomi tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, kemiskinan September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dan IPM 2025 mencapai 75,90. Perbaikan tersebut penting, tetapi tidak menghapus pengalaman sebagian masyarakat yang merasa tertekan oleh biaya hidup, ketidakpastian kerja, dan lemahnya mobilitas sosial. Artikel berargumen bahwa paradoks tersebut tidak selalu berarti statistik salah; ia menunjukkan bahwa indikator agregat menangkap dimensi yang berbeda dari pengalaman rumah tangga. Kebijakan pembangunan perlu bergerak dari growth-first menuju inclusive, job-rich, productivity-led, and welfare-enhancing growth. Keberhasilan ekonomi seharusnya dinilai bukan hanya dari seberapa besar output bertambah, melainkan dari siapa yang memperoleh pendapatan, seberapa aman pekerjaan, bagaimana biaya hidup bergerak, bagaimana layanan dasar tersedia, dan apakah generasi berikutnya memiliki peluang yang lebih baik.

Kata Kunci

pertumbuhan ekonomi; kesejahteraan; PDB; upah riil; ketimpangan; kemiskinan; kualitas pekerjaan; biaya hidup; produktivitas; pertumbuhan inklusif; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Kesejahteraan mengukur kemampuan manusia menjalani kehidupan yang sehat, aman, bermartabat, dan memiliki peluang. Hubungan keduanya kuat tetapi tidak otomatis. Distribusi pendapatan, harga, pekerjaan, layanan publik, aset, lingkungan, dan struktur rumah tangga menjadi jembatan antara pertumbuhan dan kehidupan sehari-hari.

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025, dengan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta. Pada saat yang sama, kemiskinan resmi September 2025 turun menjadi 8,25 persen dan jumlah penduduk miskin menjadi 23,36 juta. IPM 2025 meningkat menjadi 75,90. Angka-angka tersebut memperlihatkan kemajuan nyata. Namun indikator nasional tidak berarti setiap rumah tangga mengalami kemajuan dengan intensitas yang sama.

Perasaan bahwa kesejahteraan tidak meningkat dapat muncul ketika pendapatan nominal naik lebih lambat daripada biaya kebutuhan pokok. Inflasi umum dapat terkendali, tetapi kelompok tertentu menghadapi inflasi efektif lebih tinggi karena sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan, sewa, transportasi, pendidikan, atau kesehatan. Rata-rata nasional tidak selalu menggambarkan keranjang konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.

Pertumbuhan juga dapat bersifat padat modal dan kurang menciptakan pekerjaan bermutu. Investasi dan ekspor menaikkan PDB, tetapi jika keterkaitan dengan pemasok lokal, tenaga kerja, teknologi domestik, dan penerimaan daerah lemah, manfaatnya menyebar secara terbatas. Pekerjaan baru mungkin informal, tanpa perlindungan, jam kerja tidak pasti, dan produktivitas rendah. Tingkat pengangguran dapat turun tanpa peningkatan kualitas pekerjaan.

Ketimpangan bukan hanya persoalan pendapatan tahunan, tetapi kepemilikan aset. Ketika harga tanah, rumah, saham, dan bisnis meningkat, pemilik aset menikmati capital gain. Rumah tangga tanpa aset menghadapi harga masuk yang semakin tinggi. Pertumbuhan yang meningkatkan nilai aset dapat memperlebar kesenjangan antargenerasi meskipun pendapatan rata-rata naik.

Solusi bukan meninggalkan pertumbuhan. Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan untuk menciptakan pekerjaan, membiayai layanan, dan mengurangi kemiskinan. Persoalannya adalah mutu pertumbuhan. Kebijakan harus mendorong pertumbuhan yang padat pekerjaan produktif, meningkatkan upah riil, memperkuat UMKM, memperluas layanan dasar, mengurangi biaya perumahan dan transportasi, menjaga lingkungan, serta membagi keuntungan produktivitas secara lebih adil.

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Paradoks Pertumbuhan dan Kesejahteraan
2. PDB Bukan Kesejahteraan, tetapi Tetap Penting
3. Dari Produksi ke Pendapatan Rumah Tangga
4. Distribusi: Siapa yang Menikmati Pertumbuhan?
5. Pertumbuhan Padat Modal dan Lemahnya Penciptaan Kerja
6. Kualitas Pekerjaan dan Fenomena Working Poor
7. Upah Riil, Produktivitas, dan Daya Tawar
8. Biaya Hidup dan Inflasi yang Dirasakan
9. Kemiskinan Resmi, Kerentanan, dan Kelas Menengah Rapuh
10. Ketimpangan Aset dan Mobilitas Antargenerasi
11. Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengubah Pertumbuhan menjadi Kesejahteraan
12. Perumahan, Transportasi, dan Geografi Kesempatan
13. Ketimpangan Wilayah dan Konsentrasi Ekonomi
14. Struktur Ekonomi, Industrialisasi, dan Produktivitas
15. UMKM, Informalitas, dan Dualisme Ekonomi
16. Perempuan, Kerja Perawatan, dan Kesejahteraan yang Tidak Terukur
17. Lingkungan, Eksternalitas, dan Pertumbuhan yang Mengurangi Kualitas Hidup
18. Digitalisasi, Platform, dan Distribusi Nilai Tambah
19. Pajak, Belanja Publik, dan Redistribusi
20. Tata Kelola, Korupsi, dan Kebocoran Manfaat
21. Mengukur Kesejahteraan Secara Lebih Lengkap
22. Kondisi Indonesia: Kemajuan dan Kesenjangan Pengalaman
23. Delapan Studi Kasus
24. Agenda Kebijakan Pertumbuhan yang Menyejahterakan
25. Kesimpulan: Dari Besaran Ekonomi menuju Mutu Kehidupan

Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Paradoks Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa perasaan sejahtera yang merata. Dalam konteks 1. pendahuluan: paradoks pertumbuhan dan kesejahteraan, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian

transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Paradoks muncul karena produksi agregat dan pengalaman rumah tangga mengukur hal berbeda. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Kesejahteraan dipengaruhi pendapatan, harga, waktu, keamanan, layanan, dan lingkungan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Narasi pertumbuhan perlu dibaca bersama distribusi dan struktur. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Pertanyaan utama bukan hanya berapa besar pertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan ditransmisikan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa perasaan sejahtera yang merata. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

2. PDB Bukan Kesejahteraan, tetapi Tetap Penting

PDB mengukur nilai produksi akhir dalam suatu wilayah dan periode. Dalam konteks 2. pdb bukan kesejahteraan, tetapi tetap penting, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

PDB tidak menghitung distribusi, kerja rumah tangga, kualitas lingkungan, dan rasa aman. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

PDB per kapita merupakan rata-rata dan dapat naik tanpa kenaikan median. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Meski terbatas, PDB penting sebagai basis produksi dan fiskal. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kesalahan kebijakan terjadi ketika indikator produksi dijadikan indikator tunggal kehidupan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pdb mengukur nilai produksi akhir dalam suatu wilayah dan periode. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

3. Dari Produksi ke Pendapatan Rumah Tangga

Nilai tambah dibagi menjadi upah, keuntungan, sewa, bunga, pajak, dan penyusutan. Dalam konteks 3. dari produksi ke pendapatan rumah tangga, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Bagian pendapatan tenaga kerja menentukan seberapa luas manfaat menyebar. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Keuntungan dapat ditahan, dibagikan, atau mengalir ke luar wilayah. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pendapatan rumah tangga juga dipengaruhi transfer dan pajak. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Transmisi pertumbuhan bergantung pada institusi pasar dan kebijakan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, nilai tambah dibagi menjadi upah, keuntungan, sewa, bunga, pajak, dan penyusutan. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

4. Distribusi: Siapa yang Menikmati Pertumbuhan?

Pertumbuhan rata-rata dapat menutupi perbedaan besar antar kelompok. Dalam konteks 4. distribusi: siapa yang menikmati pertumbuhan?, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang

dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Kelompok atas memiliki akses modal, pendidikan, jaringan, dan aset. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Pertumbuhan pada sektor tertentu tidak otomatis menjangkau pekerja sektor lain. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Median dan pertumbuhan menurut desil memberi informasi lebih bermakna. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Distribusi awal memengaruhi distribusi manfaat berikutnya. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pertumbuhan rata-rata dapat menutupi perbedaan besar antar kelompok. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

5. Pertumbuhan Padat Modal dan Lemahnya Penciptaan Kerja

Sektor padat modal dapat menghasilkan output tinggi dengan pekerja terbatas. Dalam konteks 5. pertumbuhan padat modal dan lemahnya penciptaan kerja, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Otomasi meningkatkan produktivitas tetapi dapat menekan permintaan kerja rutin. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Linkage domestik menentukan apakah investasi menciptakan efek berganda. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Enclave economy dapat tumbuh tanpa menggerakkan ekonomi lokal. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kebijakan industri perlu menilai kualitas pekerjaan, bukan nilai investasi saja. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, sektor padat modal dapat menghasilkan output tinggi dengan pekerja terbatas. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

6. Kualitas Pekerjaan dan Fenomena Working Poor

Pekerjaan tidak selalu membebaskan seseorang dari kemiskinan. Dalam konteks 6. kualitas pekerjaan dan fenomena working poor, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat

diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Jam tidak pasti, informalitas, dan upah rendah mengurangi keamanan. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Pengangguran rendah dapat bersamaan dengan underemployment. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Jaminan sosial dan hak kerja memengaruhi kesejahteraan. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Job-rich growth harus berarti pekerjaan yang produktif dan bermartabat. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pekerjaan tidak selalu membebaskan seseorang dari kemiskinan. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

7. Upah Riil, Produktivitas, dan Daya Tawar

Upah nominal harus dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Dalam konteks 7. upah riil, produktivitas, dan daya tawar, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Produktivitas tidak otomatis diterjemahkan menjadi kenaikan upah. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung

biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Daya tawar, pasar kerja, dan institusi menentukan pembagian. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Ketika labor share turun, pertumbuhan lebih banyak menjadi keuntungan. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Upah riil yang stagnan menjelaskan jarak antara statistik dan pengalaman. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, upah nominal harus dibandingkan dengan harga barang dan jasa. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

8. Biaya Hidup dan Inflasi yang Dirasakan

Inflasi rata-rata menggunakan keranjang agregat. Dalam konteks 8. biaya hidup dan inflasi yang dirasakan, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Rumah tangga berbeda memiliki struktur pengeluaran berbeda. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Pangan, sewa, transportasi, pendidikan, dan kesehatan sangat menentukan persepsi. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Harga aset tidak sepenuhnya tercermin dalam inflasi konsumen. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kebijakan biaya hidup perlu berbasis kelompok dan wilayah. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, inflasi rata-rata menggunakan keranjang agregat, juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

9. Kemiskinan Resmi, Kerentanan, dan Kelas Menengah Rapuh

Garis kemiskinan penting tetapi bukan batas aman kesejahteraan. Dalam konteks 9, kemiskinan resmi, kerentanan, dan kelas menengah rapuh, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan

pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Rumah tangga sedikit di atas garis kemiskinan mudah jatuh akibat guncangan. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Kelas menengah rentan menghadapi biaya kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Perbedaan garis nasional dan internasional harus dipahami secara metodologis. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Analisis kebijakan memerlukan spektrum kemiskinan dan kerentanan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, garis kemiskinan penting tetapi bukan batas aman kesejahteraan. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

10. Ketimpangan Aset dan Mobilitas Antargenerasi

Aset menentukan keamanan, akses kredit, dan warisan. Dalam konteks 10. ketimpangan aset dan mobilitas antargenerasi, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Harga tanah dan rumah dapat naik lebih cepat daripada pendapatan. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber

pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Anak dari keluarga kaya memperoleh lingkungan dan jaringan lebih baik. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Ketimpangan aset dapat bertahan meskipun Gini konsumsi turun. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Mobilitas memerlukan layanan publik dan akses aset produktif. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, aset menentukan keamanan, akses kredit, dan warisan. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

11. Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengubah Pertumbuhan menjadi Kesejahteraan

Pendapatan tidak otomatis menjadi kapabilitas tanpa layanan bermutu. Dalam konteks 11. pendidikan dan kesehatan sebagai pengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Biaya dan mutu pendidikan memengaruhi mobilitas. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Kesehatan buruk mengurangi produktivitas dan menguras tabungan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Perbedaan kualitas layanan memperbesar ketimpangan kesempatan. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Belanja sosial yang efektif memperkuat hubungan pertumbuhan-kesejahteraan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pendapatan tidak otomatis menjadi kapabilitas tanpa layanan bermutu. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

12. Perumahan, Transportasi, dan Geografi Kesempatan

Lokasi rumah menentukan akses kerja, sekolah, dan layanan. Dalam konteks 12. perumahan, transportasi, dan geografi kesempatan, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Harga hunian dekat pusat ekonomi sering tidak terjangkau. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Perjalanan panjang mengurangi waktu, kesehatan, dan produktivitas. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Urbanisasi tanpa perencanaan menciptakan biaya tersembunyi. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kesejahteraan perkotaan memerlukan integrasi lahan, perumahan, dan transportasi. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, lokasi rumah menentukan akses kerja, sekolah, dan layanan. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

13. Ketimpangan Wilayah dan Konsentrasi Ekonomi

Pertumbuhan nasional dapat terkonsentrasi pada pulau dan kota tertentu. Dalam konteks 13. ketimpangan wilayah dan konsentrasi ekonomi, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Daerah penghasil sumber daya belum tentu menikmati nilai tambah. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Infrastruktur dapat menghubungkan atau hanya mengalirkan sumber keluar. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Transfer fiskal perlu membangun kapasitas, bukan ketergantungan. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Konvergensi wilayah membutuhkan produktivitas lokal dan layanan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pertumbuhan nasional dapat terkonsentrasi pada pulau dan kota tertentu. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

14. Struktur Ekonomi, Industrialisasi, dan Produktivitas

Transformasi struktural memindahkan tenaga kerja ke kegiatan lebih produktif. Dalam konteks 14. struktur ekonomi, industrialisasi, dan produktivitas, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Deindustrialisasi dini membatasi pekerjaan menengah yang stabil. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Sektor jasa sangat beragam dari teknologi tinggi hingga informal. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Industri pengolahan menciptakan linkage, pembelajaran, dan ekspor. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kebijakan harus mengejar upgrading, bukan sekadar perubahan komposisi. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, transformasi struktural memindahkan tenaga kerja ke kegiatan lebih produktif. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

15. UMKM, Informalitas, dan Dualisme Ekonomi

UMKM menyerap tenaga kerja tetapi produktivitasnya sangat beragam. Dalam konteks 15. umkm, informalitas, dan dualisme ekonomi, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Formalitas tanpa manfaat dapat menjadi beban. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan manajemen menentukan upgrading. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Rantai pasok perusahaan besar dapat menjadi jembatan produktivitas. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Pertumbuhan inklusif perlu menghubungkan sektor modern dan ekonomi rakyat. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, umkm menyerap tenaga kerja tetapi produktivitasnya sangat beragam. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

16. Perempuan, Kerja Perawatan, dan Kesejahteraan yang Tidak Terukur

Kerja rumah tangga dan perawatan banyak tidak masuk PDB. Dalam konteks 16. perempuan, kerja perawatan, dan kesejahteraan yang tidak terukur, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Pertumbuhan dapat menaikkan beban ganda perempuan. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Layanan pengasuhan memperluas partisipasi dan kesejahteraan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Ketimpangan waktu sama pentingnya dengan ketimpangan pendapatan. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kebijakan perlu mengakui care economy sebagai infrastruktur sosial. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, kerja rumah tangga dan perawatan banyak tidak masuk pdb. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

17. Lingkungan, Eksternalitas, dan Pertumbuhan yang Mengurangi Kualitas Hidup

Produksi dapat naik sambil udara, air, dan kesehatan memburuk. Dalam konteks 17. lingkungan, eksternalitas, dan pertumbuhan yang mengurangi kualitas hidup, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif,

harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Biaya lingkungan sering tidak masuk harga pasar. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Masyarakat lokal dapat menanggung dampak sementara manfaat mengalir keluar. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kerusakan aset alam mengurangi kesejahteraan masa depan. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Green growth memerlukan internalisasi biaya dan transisi adil. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, produksi dapat naik sambil udara, air, dan kesehatan memburuk. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

18. Digitalisasi, Platform, dan Distribusi Nilai Tambah

Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akses. Dalam konteks 18. digitalisasi, platform, dan distribusi nilai tambah, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Network effects dapat menciptakan konsentrasi platform. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Pekerja gig memperoleh fleksibilitas tetapi menghadapi ketidakpastian. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Data menjadi sumber nilai yang tidak selalu dibagi. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Kebijakan persaingan dan perlindungan pekerja menentukan hasil. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akses. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

19. Pajak, Belanja Publik, dan Redistribusi

Negara mengubah pendapatan pasar melalui pajak dan transfer. Dalam konteks 19. pajak, belanja publik, dan redistribusi, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Komposisi pajak memengaruhi keadilan. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Belanja publik dapat meningkatkan pendapatan nyata melalui layanan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mahal dan regresif. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Efektivitas fiskal bergantung pada desain, data, dan implementasi. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, negara mengubah pendapatan pasar melalui pajak dan transfer. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

20. Tata Kelola, Korupsi, dan Kebocoran Manfaat

Pertumbuhan tidak menyejahterakan bila rente dan kebocoran tinggi. Dalam konteks 20. tata kelola, korupsi, dan kebocoran manfaat, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Perizinan, pengadaan, dan monopoli dapat memindahkan nilai ke elite. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Ketidakpastian hukum menekan investasi produktif. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul

lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Transparansi dan akuntabilitas memperbaiki kualitas belanja. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Institusi menentukan apakah pertumbuhan menjadi public value. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pertumbuhan tidak menyejahterakan bila rente dan kebocoran tinggi. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

21. Mengukur Kesejahteraan Secara Lebih Lengkap

Dashboard perlu menggabungkan PDB, median, upah, kemiskinan, dan ketimpangan. Dalam konteks 21. mengukur kesejahteraan secara lebih lengkap, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Kualitas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, waktu, dan lingkungan harus masuk. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Indikator subjektif memberi informasi pengalaman. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Data perlu terpilah menurut wilayah dan kelompok. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil

belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Pengukuran yang baik mengubah fokus kebijakan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, dashboard perlu menggabungkan pdb, median, upah, kemiskinan, dan ketimpangan. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

22. Kondisi Indonesia: Kemajuan dan Kesenjangan Pengalaman

Indonesia mencatat pertumbuhan, penurunan kemiskinan, dan kenaikan IPM. Dalam konteks 22. kondisi indonesia: kemajuan dan kesenjangan pengalaman, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Perbaikan agregat tidak berarti tekanan rumah tangga menghilang. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Perbedaan wilayah dan kelas tetap besar. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Rasa tidak sejahtera dapat mencerminkan biaya hidup dan ketidakpastian. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Debat publik perlu menghormati data dan pengalaman. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, Indonesia mencatat pertumbuhan, penurunan kemiskinan, dan kenaikan ipm. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

23. Delapan Studi Kasus

Kasus konkret memperlihatkan mekanisme transmisi yang berbeda. Dalam konteks 23. delapan studi kasus, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Sektor, wilayah, dan posisi rumah tangga menentukan dampak. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Pertumbuhan dapat positif tetapi manfaat bersih negatif bagi kelompok tertentu. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Desain kebijakan perlu berbasis konteks. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Studi kasus menghubungkan angka makro dengan kehidupan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi,

teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, kasus konkret memperlihatkan mekanisme transmisi yang berbeda. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

24. Agenda Kebijakan Pertumbuhan yang Menyejahterakan

Pertumbuhan perlu diarahkan pada pekerjaan produktif dan upah riil. Dalam konteks 24. agenda kebijakan pertumbuhan yang menyejahterakan, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Layanan dasar dan biaya hidup menjadi bagian strategi ekonomi. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

UMKM dan wilayah perlu terhubung dengan pusat pertumbuhan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Fiskal dan regulasi harus memperbaiki distribusi. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Keberhasilan harus dipantau dengan indikator kesejahteraan. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pertumbuhan perlu diarahkan pada pekerjaan produktif dan upah riil. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang

ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Produksi	Berapa besar output bertambah?	PDB riil, produktivitas
Distribusi	Siapa menerima pendapatan?	Median, Gini, labor share
Keamanan	Seberapa stabil kehidupan?	Formalitas, underemployment, perlindungan
Kapabilitas	Apakah pilihan hidup meluas?	Kesehatan, pendidikan, layanan, waktu

25. Kesimpulan: Dari Besaran Ekonomi menuju Mutu Kehidupan

PDB diperlukan tetapi tidak cukup. Dalam konteks 25. kesimpulan: dari besaran ekonomi menuju mutu kehidupan, persoalan ini perlu dilihat sebagai rangkaian transmisi. Pertumbuhan bermula dari kenaikan produksi, tetapi baru menjadi kesejahteraan ketika menghasilkan pendapatan yang tersebar, pekerjaan yang aman, penerimaan negara yang efektif, harga yang terjangkau, dan layanan yang dapat diakses. Setiap mata rantai dapat bekerja atau terputus. Karena itu, pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Kesejahteraan muncul melalui distribusi, keamanan, dan layanan. Analisis agregat sering menyederhanakan masyarakat menjadi satu rumah tangga rata-rata. Padahal rumah tangga memiliki sumber pendapatan, aset, lokasi, usia, komposisi anggota, dan kebutuhan yang berbeda. Pekerja formal di kota, petani kecil, pedagang informal, pensiunan, dan keluarga muda tidak menerima manfaat atau menanggung biaya dengan cara sama. Kebijakan yang hanya membaca angka rata-rata berisiko kehilangan kelompok yang tidak terwakili.

Paradoks bukan alasan menolak pertumbuhan. Dimensi waktu juga penting. PDB dapat naik pada satu tahun sementara manfaat rumah tangga baru muncul kemudian, atau sebaliknya biaya sosial muncul lebih awal daripada manfaat. Investasi infrastruktur mungkin mengganggu mata pencaharian sebelum membuka akses. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi pengembangan tenaga kerja dan pemasok lokal membutuhkan waktu. Evaluasi harus membedakan efek jangka pendek, menengah, dan panjang.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan bermutu. Secara manajerial, pemerintah perlu menghubungkan indikator output dengan outcome. Nilai investasi, kilometer jalan, jumlah sekolah, atau besaran subsidi adalah input dan output. Outcome adalah kenaikan upah, turunnya waktu tempuh, membaiknya hasil belajar, meningkatnya kesehatan, dan berkurangnya kerentanan. Tanpa hubungan tersebut, program dapat terlihat berhasil secara administratif tetapi lemah dalam kehidupan warga.

Tujuan akhirnya adalah perluasan kemampuan manusia. Prinsip distributif harus hadir sejak desain. Kebijakan tidak cukup mengandalkan trickle-down setelah pertumbuhan terjadi. Pilihan sektor, lokasi, teknologi, skema pajak, kepemilikan, dan standar kerja menentukan distribusi sejak awal. Growth incidence analysis, social impact assessment, dan evaluasi kelompok terdampak dapat membantu pemerintah melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Dari sudut ekonomi politik, pdb diperlukan tetapi tidak cukup. juga dipengaruhi kekuasaan. Kelompok yang memiliki informasi, akses, modal, dan pengaruh lebih mampu menangkap peluang. Kelompok dengan daya tawar rendah menerima harga, upah, dan kondisi yang ditentukan pihak lain. Reformasi kesejahteraan karenanya bukan semata persoalan teknis, tetapi penguatan institusi, persaingan, transparansi, organisasi pekerja, partisipasi publik, dan akses hukum.

Studi Kasus: Menghubungkan Pertumbuhan dengan Pengalaman Rumah Tangga

Kasus 1: Kawasan Industri yang Tumbuh Cepat

Sebuah kawasan industri mencatat kenaikan investasi dan ekspor. PDB daerah meningkat, tetapi sebagian pekerjaan teknis diisi tenaga dari luar, pemasok lokal belum memenuhi standar, dan harga tanah serta sewa melonjak. Pemilik tanah menikmati keuntungan, sementara keluarga penyewa menghadapi biaya lebih tinggi. Tanpa program keterampilan, perumahan, transportasi, dan pengembangan pemasok, pertumbuhan lokal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan penduduk lama.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 2: Kota Jasa dengan Harga Hunian Tinggi

Sektor jasa modern tumbuh dan menciptakan pendapatan tinggi bagi profesional. Namun pekerja layanan, keamanan, kebersihan, dan perdagangan menghadapi sewa mahal serta perjalanan jauh. PDB per kapita kota tinggi, tetapi kesejahteraan pekerja rendah karena biaya akses ke pusat kerja. Kebijakan perumahan terjangkau dan transportasi publik menjadi kebijakan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 3: Desa Penghasil Komoditas

Harga komoditas dan ekspor meningkat. Petani dengan lahan luas memperoleh keuntungan, sedangkan buruh tani dan petani kecil yang membeli input mahal tidak selalu menikmati kenaikan. Pendapatan juga berfluktuasi. Koperasi, akses pembiayaan, asuransi, penyimpanan, pengolahan, dan informasi harga menentukan apakah boom komoditas menjadi kemajuan bersama.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 4: Digitalisasi UMKM

Platform digital memperluas pasar UMKM. Penjualan bruto meningkat, tetapi biaya iklan, komisi, logistik, dan ketergantungan platform mengurangi margin. Usaha yang memiliki merek dan data pelanggan memperoleh manfaat lebih besar. Peningkatan omzet tidak selalu sama dengan kenaikan kesejahteraan pemilik dan pekerja.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 5: Pertumbuhan Pariwisata

Kunjungan meningkat dan hotel tumbuh. Pendapatan daerah naik, tetapi pekerjaan musiman dan berupah rendah mendominasi. Harga lahan serta pangan lokal naik, dan tekanan lingkungan meningkat. Pariwisata menyejahterakan bila keterkaitan dengan pemasok lokal, pekerja terampil, konservasi, dan distribusi pendapatan kuat.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 6: Keluarga Muda di Perkotaan

Dua anggota keluarga bekerja dan pendapatan nominal naik. Namun biaya penitipan anak, transportasi, cicilan, sewa, pendidikan, dan kesehatan menyerap kenaikan. PDB tumbuh, tetapi waktu keluarga berkurang dan tabungan tetap rendah. Layanan pengasuhan dan tata kota dapat lebih menentukan kesejahteraan daripada kenaikan pendapatan kecil.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 7: Hilirisasi Sumber Daya

Ekspor produk olahan meningkatkan nilai tambah dan penerimaan. Namun manfaat lokal bergantung pada kepemilikan, pajak, tenaga kerja, transfer teknologi, dan dampak lingkungan. Bila energi, air, dan lahan terserap tanpa kompensasi yang memadai, masyarakat dapat merasakan biaya lebih besar daripada manfaat.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kasus 8: Pertumbuhan yang Didukung Belanja Negara

Belanja pemerintah mendorong konstruksi dan konsumsi. Dalam jangka pendek output naik. Jika proyek tidak menjawab kebutuhan, biaya pemeliharaan tinggi, atau terjadi kebocoran, dampak kesejahteraan terbatas. Kualitas belanja dan outcome layanan lebih penting daripada besaran belanja semata.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya menghitung manfaat bersih dan distribusinya. Pemerintah perlu menilai pendapatan, harga, waktu, lingkungan, akses, dan risiko. Satu indikator ekonomi tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kelompok menjadi lebih sejahtera.

Kerangka Diagnosis: Dua Belas Pertanyaan

1. Sektor apa yang menyumbang pertumbuhan dan berapa tenaga kerja yang diserap?
2. Apakah produktivitas diikuti kenaikan upah riil?
3. Bagaimana pertumbuhan pendapatan median dibanding rata-rata?
4. Kelompok mana yang menghadapi inflasi efektif paling tinggi?
5. Apakah pekerjaan baru formal, aman, dan memiliki mobilitas?

6. Bagaimana harga rumah, tanah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi bergerak?
7. Apakah UMKM dan pemasok lokal terhubung dengan investasi besar?
8. Apakah penerimaan publik meningkat dan berubah menjadi layanan?
9. Siapa menanggung biaya lingkungan dan sosial?
10. Apakah ketimpangan wilayah mengecil atau melebar?
11. Apakah generasi muda memiliki akses aset dan pekerjaan bermutu?
12. Apakah masyarakat merasakan peningkatan kontrol, keamanan, dan harapan?

Agenda Kebijakan 2026-2030

1. Menciptakan Pekerjaan Produktif

Kebijakan investasi perlu mengaitkan insentif dengan penciptaan kerja bermutu, pelatihan, pemasok lokal, dan transfer teknologi. Sektor manufaktur, agroindustri, ekonomi hijau, layanan modern, perawatan, dan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pekerjaan. Informasi pasar kerja serta pendidikan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan nyata.

2. Mendorong Kenaikan Upah Riil

Produktivitas, persaingan, kepatuhan standar kerja, perundingan, dan mobilitas pekerja perlu diperkuat. Upah minimum saja tidak cukup tanpa produktivitas dan penegakan. Kebijakan harus mengurangi monopsoni, meningkatkan transparansi upah, dan mendorong profit-sharing.

3. Menurunkan Biaya Hidup Struktural

Perumahan, transportasi, pangan, pendidikan, kesehatan, energi, dan pengasuhan harus menjadi inti strategi ekonomi. Subsidi sementara membantu, tetapi reformasi pasokan dan tata ruang memberikan dampak berkelanjutan. Kebijakan biaya hidup perlu berbasis data kelompok dan wilayah.

4. Memperkuat Layanan Universal

Layanan dasar berkualitas meningkatkan pendapatan riil karena rumah tangga tidak perlu membeli alternatif mahal. Pemerataan mutu lebih penting daripada cakupan administratif. Pendanaan, SDM, tata kelola, dan evaluasi outcome harus terintegrasi.

5. Memperluas Kepemilikan Aset

Akses rumah, tanah produktif, tabungan, pensiun, kepemilikan usaha, dan instrumen investasi aman membantu mobilitas. Kebijakan perlu mencegah spekulasi lahan dan memperluas pembiayaan yang bertanggung jawab. Aset publik dan koperasi dapat membagi manfaat.

6. Meningkatkan Produktivitas UMKM

Pendampingan manajemen, digitalisasi, standar, pembiayaan, logistik, dan kemitraan rantai pasok perlu disediakan sebagai paket. Formalisasi harus memberi manfaat nyata. Pengadaan publik dapat membuka pasar bagi usaha yang memenuhi kualitas.

7. Memperkuat Perlindungan Sosial Adaptif

Perlindungan harus menutupi guncangan kesehatan, kehilangan kerja, bencana, dan transisi ekonomi. Sistem perlu responsif terhadap data, portabel, dan mudah diakses. Bantuan harus dikombinasikan dengan layanan serta pemberdayaan.

8. Menerapkan Green and Just Transition

Biaya lingkungan harus masuk keputusan investasi. Masyarakat terdampak memerlukan partisipasi, kompensasi, perlindungan, dan alternatif penghidupan. Pertumbuhan yang menghabiskan aset alam bukan kenaikan kesejahteraan berkelanjutan.

9. Memperbaiki Fiskal dan Redistribusi

Penerimaan perlu diperluas secara adil, belanja diarahkan pada outcome, dan kebocoran dikurangi. Evaluasi distribusional dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan. Transparansi fiskal memperkuat kepercayaan.

10. Membangun Dashboard Kesejahteraan

Dashboard nasional dan daerah menggabungkan PDB, pendapatan median, upah riil, kemiskinan, kerentanan, kualitas kerja, biaya hidup, layanan, aset, lingkungan, dan kepuasan hidup. Data terpilih membantu koreksi cepat.

Glossarium

Capital-intensive growth: Pertumbuhan yang terutama menggunakan modal dan teknologi dengan penyerapan tenaga kerja relatif kecil.

Capability: Kemampuan nyata seseorang untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai.

Deindustrialisasi dini: Penurunan peran industri pengolahan sebelum suatu negara mencapai pendapatan tinggi.

Disposable income: Pendapatan yang dapat digunakan rumah tangga setelah pajak dan transfer.

Eksternalitas: Biaya atau manfaat kegiatan ekonomi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar.

Gini ratio: Ukuran ketimpangan distribusi; nilai lebih tinggi menunjukkan ketimpangan lebih besar.

Growth incidence curve: Kurva yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan atau konsumsi pada berbagai kelompok distribusi.

Human Development Index: Indeks gabungan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Inflasi efektif: Perubahan biaya hidup yang dirasakan kelompok tertentu berdasarkan keranjang pengeluarannya.

Informalitas: Kondisi pekerjaan atau usaha yang tidak sepenuhnya tercakup aturan dan perlindungan formal.

Labor share: Bagian pendapatan nasional yang diterima tenaga kerja.

Median income: Pendapatan titik tengah; separuh penduduk di bawah dan separuh di atas.

Multidimensional poverty: Kemiskinan yang mencakup kekurangan pada berbagai dimensi selain pendapatan.

PDB: Nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah.

PDB per kapita: PDB dibagi jumlah penduduk; merupakan rata-rata, bukan pendapatan aktual setiap orang.

Pertumbuhan inklusif: Pertumbuhan yang memperluas kesempatan dan membagi manfaat secara luas.

Produktivitas tenaga kerja: Output yang dihasilkan per pekerja atau per jam kerja.

Real wage: Upah yang telah disesuaikan dengan perubahan harga.

Underemployment: Kondisi bekerja kurang dari yang diinginkan atau di bawah kapasitas.

Vulnerability: Kerentanan rumah tangga jatuh miskin akibat guncangan.

Working poor: Orang yang bekerja tetapi tetap hidup dalam kemiskinan atau kerentanan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674287013>
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Indikator kesejahteraan rakyat 2025*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro di Indonesia 2025*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2025*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). *Indeks pembangunan manusia 2025*. BPS.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623. <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Fleurbaey, M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. *Journal of Economic Literature*, 47(4), 1029-1075. <https://doi.org/10.1257/jel.47.4.1029>
- International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation*. IMF.
- Kanbur, R., & Rauniar, G. (2010). Conceptualizing inclusive development: With applications to rural infrastructure and development assistance. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 437-454. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.516163>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *How's life? Measuring well-being*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264121164-en>

- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803-1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*.
- World Bank. (2025). *The World Bank's updated global poverty lines: Indonesia*. World Bank.
- World Bank. (2026). *Indonesia country overview*. World Bank.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran dan diskusi akademik. Data makro Indonesia menggunakan rilis resmi yang tersedia sampai Agustus 2026. Angka dapat diperbarui pada rilis berikutnya; pembaca dianjurkan memeriksa sumber resmi ketika menggunakan artikel untuk keputusan kebijakan operasional.

Pendalaman Analitis: Mengapa Kesenjangan antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan Bertahan

A. Perbedaan antara Pendapatan Rata-Rata dan Pendapatan Median

PDB per kapita sering digunakan untuk memberi gambaran tingkat kemakmuran rata-rata. Namun rata-rata sensitif terhadap nilai sangat tinggi. Bila pendapatan kelompok atas meningkat tajam sementara pendapatan sebagian besar penduduk tidak berubah, rata-rata tetap naik. Pendapatan median memberi gambaran berbeda karena menunjukkan posisi rumah tangga di tengah distribusi. Dalam masyarakat dengan ketimpangan tinggi, jarak antara rata-rata dan median dapat lebar. Karena itu, masyarakat dapat mendengar berita bahwa pendapatan per kapita meningkat tetapi tidak merasakan kenaikan yang sama.

Perbedaan ini bukan masalah statistik semata. Ia memengaruhi komunikasi kebijakan. Pemerintah yang hanya menonjolkan rata-rata dapat dianggap tidak memahami kehidupan masyarakat. Sebaliknya, mengabaikan kenaikan rata-rata juga keliru karena kapasitas produksi memang bertambah. Pendekatan yang lebih baik menyajikan keduanya: pertumbuhan rata-rata, median, dan pertumbuhan menurut kelompok pendapatan. Dengan demikian, publik dapat melihat apakah kemajuan menyebar atau terkonsentrasi.

Median juga perlu dibaca bersama komposisi rumah tangga. Pendapatan per orang berbeda dari pendapatan rumah tangga karena ukuran keluarga, jumlah pencari nafkah, dan tanggungan. Keluarga muda dengan anak menghadapi kebutuhan yang berbeda dari individu lajang. Equivalised income dan konsumsi per kapita membantu, tetapi tetap tidak menangkap seluruh variasi. Analisis kesejahteraan harus mengakui kompleksitas tersebut.

Kebijakan yang berorientasi median memusatkan perhatian pada pekerjaan dan biaya hidup kelompok luas, bukan hanya investasi besar atau perlindungan kelompok termiskin. Ia menghubungkan pertumbuhan dengan kelas menengah, mobilitas, dan rasa aman. Meningkatkan median secara berkelanjutan memerlukan produktivitas luas, upah, layanan publik, dan akses aset.

B. Pendapatan Nasional versus Pendapatan Domestik yang Dinikmati

PDB mengukur produksi di dalam wilayah, termasuk oleh perusahaan asing. Sebagian keuntungan dapat dikirim ke luar negeri, sementara sebagian upah dibayarkan kepada pekerja lokal. Untuk memahami pendapatan yang tersedia bagi penduduk, indikator pendapatan nasional dan arus primer penting. Daerah penghasil sumber daya juga dapat memiliki PDRB tinggi tetapi pendapatan rumah tangga rendah bila kepemilikan dan tenaga kerja berasal dari luar.

Perbedaan antara lokasi produksi dan lokasi penerima pendapatan menjelaskan mengapa kawasan tambang atau industri tidak selalu tampak sejahtera. Nilai tambah dicatat di tempat produksi, tetapi keuntungan masuk ke kantor pusat, pajak tertentu masuk ke pusat, dan pembelian mesin berasal dari luar. Masyarakat lokal memperoleh upah, pajak daerah tertentu, atau peluang usaha, tetapi besarnya tergantung linkage.

Kebijakan perlu memperkuat kandungan lokal secara cerdas. Tujuannya bukan memaksa semua input diproduksi lokal tanpa efisiensi, tetapi membangun kemampuan pemasok, tenaga kerja, dan inovasi. Pelatihan, sertifikasi, akses pembiayaan, dan koordinasi perusahaan besar dengan UMKM dapat meningkatkan retensi nilai. Transparansi penerimaan dan manfaat lokal juga penting.

Pada tingkat nasional, arus keuntungan bukan selalu kerugian. Investasi asing membawa modal, pasar, dan teknologi. Persoalannya adalah keseimbangan antara imbal hasil investor dan pembentukan kapasitas domestik. Kebijakan yang berhasil memastikan bahwa investasi tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga pengetahuan, pekerjaan, pajak, jaringan pemasok, dan ekspor bernilai tambah.

C. Labor Share dan Pembagian Produktivitas

Ketika produktivitas naik, nilai output per pekerja meningkat. Namun kenaikan tersebut dapat dibagi dalam bentuk upah, keuntungan, harga lebih rendah, pajak, atau investasi. Labor share mengukur bagian pendapatan yang diterima tenaga kerja. Bila produktivitas tumbuh lebih cepat daripada upah, pekerja tidak menerima proporsi penuh dari kemajuan. Hal ini dapat terjadi karena teknologi, globalisasi, konsentrasi pasar, lemahnya perundingan, atau perubahan komposisi sektor.

Labor share bukan ukuran sempurna. Pemilik usaha kecil mencampur pendapatan tenaga kerja dan modal, sedangkan penyusutan modal juga meningkat pada ekonomi modern. Namun tren pembagian tetap penting. Pertumbuhan yang digerakkan keuntungan dapat mendukung investasi, tetapi konsumsi rumah tangga dan legitimasi sosial melemah bila upah stagnan.

Pembagian produktivitas tidak harus selalu melalui kenaikan upah tunai. Ia dapat berbentuk jam kerja lebih pendek, pelatihan, jaminan, bonus, kepemilikan saham, atau layanan publik. Tetapi manfaat tersebut harus nyata dan dapat diakses. Jika produktivitas hanya menaikkan target, pekerja mengalami intensifikasi, bukan kesejahteraan.

Kebijakan perlu memperkuat kompetisi tenaga kerja, transparansi upah, mobilitas, pendidikan, dan perundingan. Perusahaan dapat menerapkan gain-sharing. Pemerintah dapat menggunakan pengadaan dan insentif untuk mendorong pekerjaan bermutu. Tujuan bukan menghambat keuntungan, tetapi memastikan hubungan yang sehat antara produktivitas, investasi, dan pendapatan pekerja.

D. Inflasi Rata-Rata dan Inflasi Menurut Kelas Sosial

Indeks harga konsumen dibangun dari keranjang rata-rata. Rumah tangga miskin menghabiskan proporsi lebih besar untuk pangan dan energi, sedangkan kelompok kaya lebih banyak pada jasa, rekreasi, atau aset. Bila harga pangan naik tetapi elektronik turun, inflasi umum dapat moderat sementara tekanan kelompok miskin tinggi. Persepsi publik karenanya dapat berbeda dari angka headline.

Selain komposisi, kualitas dan substitusi memengaruhi pengalaman. Rumah tangga dapat beralih ke barang lebih murah, mengurangi protein, menunda kesehatan, atau tinggal lebih jauh. Statistik mungkin mencatat konsumsi yang menyesuaikan, tetapi penyesuaian tersebut dapat berarti penurunan kualitas hidup. Coping strategy perlu dibaca sebagai sinyal, bukan sekadar pilihan konsumen.

Biaya perumahan merupakan tantangan. Harga rumah adalah aset dan tidak seluruhnya masuk CPI dengan cara yang sama seperti konsumsi. Bagi pembeli pertama, kenaikan harga rumah adalah hambatan besar. Pemilik rumah justru memperoleh capital gain. Satu perubahan harga menciptakan pengalaman kesejahteraan yang berlawanan.

Pemerintah perlu mengembangkan indeks biaya hidup terpilah dan dashboard harga kebutuhan esensial. Kebijakan pangan, transportasi, sewa, pengasuhan, dan kesehatan harus melihat keterjangkauan, bukan hanya inflasi rata-rata. Komunikasi yang mengakui variasi pengalaman akan lebih dipercaya.

E. Rasa Aman sebagai Dimensi Kesejahteraan

Rumah tangga tidak menilai kesejahteraan hanya dari pendapatan saat ini. Mereka mempertimbangkan risiko kehilangan kerja, sakit, bencana, gagal panen, atau kenaikan sewa. Dua keluarga dengan pendapatan sama dapat memiliki kesejahteraan berbeda bila satu memiliki kontrak tetap dan tabungan, sedangkan yang lain hidup dari pendapatan harian tanpa perlindungan.

Ketidakpastian mendorong perilaku defensif. Rumah tangga menahan konsumsi produktif, menghindari investasi pendidikan, atau menerima pekerjaan buruk karena takut kehilangan pendapatan. Hal ini mengurangi mobilitas dan produktivitas. Perlindungan sosial bukan hanya redistribusi, tetapi infrastruktur ekonomi yang memungkinkan pengambilan risiko produktif.

Rasa aman juga terkait kepercayaan pada institusi. Warga yang percaya layanan kesehatan, hukum, dan bantuan akan tersedia tidak perlu menyimpan cadangan yang sama besar. Ketika institusi lemah, biaya privat meningkat. Kesejahteraan dapat stagnan meskipun pendapatan naik karena rumah tangga harus membeli keamanan sendiri.

Indikator keamanan ekonomi dapat mencakup stabilitas pendapatan, tabungan darurat, cakupan jaminan, risiko bencana, dan keyakinan terhadap masa depan. Survei subjektif memberi informasi penting. Kebijakan perlu menargetkan ketahanan, bukan hanya pendapatan rata-rata.

F. Waktu, Kemacetan, dan Kemiskinan Waktu

Waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat disimpan. Pertumbuhan perkotaan dapat menciptakan pekerjaan, tetapi bila perumahan jauh dan transportasi buruk, pekerja menghabiskan berjam-jam di perjalanan. Pendapatan meningkat, namun waktu untuk keluarga, belajar, istirahat, dan partisipasi sosial berkurang. PDB tidak mengurangi nilai output karena kemacetan atau kelelahan.

Kemiskinan waktu sangat memengaruhi perempuan yang menggabungkan kerja berbayar dan perawatan. Tanpa layanan pengasuhan, air, transportasi, dan kesehatan yang baik, peningkatan partisipasi kerja dapat berarti beban ganda. Pendapatan rumah tangga naik, tetapi kesejahteraan subjektif dan kesehatan dapat memburuk.

Kebijakan tata ruang dan transportasi adalah kebijakan kesejahteraan. Transit-oriented development, perumahan dekat pekerjaan, layanan lingkungan, dan fleksibilitas kerja mengurangi biaya waktu. Infrastruktur digital dapat membantu, tetapi tidak semua pekerjaan dapat dilakukan jarak jauh.

Pengukuran time use perlu lebih sering digunakan. Jam kerja, perjalanan, perawatan, dan waktu luang memberi gambaran yang tidak terlihat pada PDB. Pertumbuhan yang menghemat waktu publik dapat bernilai besar meskipun tidak selalu tercatat sebagai output.

G. Ketimpangan Kesempatan dan Mobilitas

Ketimpangan hasil sering terkait ketimpangan kesempatan. Anak dari keluarga berbeda memperoleh kualitas gizi, sekolah, lingkungan, perangkat, jaringan, dan rasa aman yang berbeda. Ketika pertumbuhan meningkatkan permintaan keterampilan tinggi, mereka yang telah memiliki akses menikmati premi, sedangkan yang lain tertinggal. Ekonomi tumbuh tetapi mobilitas sosial melemah.

Pendidikan massal dapat memperluas akses, tetapi kualitas menentukan hasil. Sertifikat tanpa kompetensi tidak menghasilkan mobilitas. Demikian pula kesehatan pada masa awal kehidupan memengaruhi

kemampuan belajar dan produktivitas. Investasi pada anak merupakan strategi pertumbuhan jangka panjang sekaligus keadilan.

Mobilitas juga dipengaruhi diskriminasi, lokasi, dan koneksi. Pasar kerja tidak selalu menilai kompetensi murni. Informasi lowongan, transportasi, magang, dan jaringan profesional dapat menjadi hambatan. Kebijakan kesempatan perlu melampaui sekolah dengan membangun jembatan ke pekerjaan.

Ukuran mobilitas antargenerasi membutuhkan data longitudinal dan administratif. Pemerintah perlu memahami seberapa kuat pendapatan anak dipengaruhi pendapatan orang tua. Tujuan pembangunan bukan membuat semua hasil sama, tetapi memastikan latar kelahiran tidak terlalu menentukan masa depan.

H. Pertumbuhan, Aspirasi, dan Persepsi Relatif

Kesejahteraan subjektif dipengaruhi perbandingan. Pendapatan seseorang dapat naik, tetapi bila pendapatan kelompok referensi naik lebih cepat, ia merasa tertinggal. Media sosial memperluas kelompok referensi dan menampilkan gaya hidup yang sebelumnya jauh. Aspirasi meningkat bersama pembangunan.

Persepsi relatif bukan ilusi yang dapat diabaikan. Ia memengaruhi kepercayaan, kesehatan mental, konsumsi, dan politik. Namun kebijakan tidak dapat hanya mengejar kepuasan relatif. Tugasnya memperluas kesempatan, menjamin kebutuhan, dan menjaga fairness. Transparansi dan proses adil dapat meningkatkan penerimaan meski hasil berbeda.

Generasi muda sering membandingkan peluang dengan generasi orang tua. Mereka mungkin lebih berpendidikan tetapi menghadapi rumah mahal, kontrak tidak pasti, dan persaingan tinggi. Secara agregat negara lebih kaya, tetapi milestone dewasa lebih sulit dicapai. Ini menjelaskan paradoks antargenerasi.

Kebijakan perlu mendengar aspirasi dan menggunakan survei kepercayaan serta kepuasan. Komunikasi tidak boleh menyatakan bahwa rasa tertekan salah karena PDB tumbuh. Pengalaman adalah data yang perlu dijelaskan dan ditindaklanjuti.

I. Pertumbuhan Berbasis Utang Rumah Tangga

Konsumsi dapat meningkat karena kredit, bukan pendapatan yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, penjualan dan PDB naik. Namun cicilan mengurangi pendapatan masa depan dan meningkatkan kerentanan. Kredit produktif dan inklusi keuangan bermanfaat, tetapi kredit konsumsi yang tidak sehat dapat menciptakan kesejahteraan semu.

Rumah tangga menggunakan kredit untuk pendidikan, kesehatan, rumah, atau kebutuhan darurat ketika layanan dan perlindungan tidak cukup. Karena itu, kenaikan utang dapat menjadi indikator akses sekaligus tekanan. Analisis perlu melihat debt service, kualitas pinjaman, dan tujuan penggunaan.

Fintech memperluas akses tetapi juga risiko. Proses cepat, desain perilaku, dan data dapat mendorong pinjaman berlebihan. Perlindungan konsumen, literasi, dan pengawasan menjadi penting. Pertumbuhan sektor keuangan harus dinilai dari kontribusinya pada produktivitas dan ketahanan.

Kebijakan makroprudensial dan sosial harus terhubung. Mengendalikan kredit tanpa mengatasi biaya hidup hanya memindahkan masalah. Sebaliknya, subsidi kredit tanpa penilaian dapat memperbesar utang. Tujuannya adalah pendapatan dan aset yang sehat.

J. Mengapa Kemajuan Statistik dan Keluhan Publik Dapat Sama-Sama Benar

Data resmi dibangun melalui metodologi, sampel, definisi, dan periode tertentu. Ia penting untuk melihat pola nasional. Keluhan publik berasal dari pengalaman spesifik dan sering menyoroti kelompok atau biaya yang tidak dominan dalam agregat. Keduanya dapat benar karena menjawab pertanyaan berbeda.

Kemiskinan resmi dapat turun sementara jutaan orang tetap dekat garis kemiskinan. Gini konsumsi dapat turun sementara ketimpangan aset tinggi. Inflasi umum rendah sementara harga rumah dan pendidikan menekan. PDB tumbuh sementara upah sebagian pekerja stagnan. Tidak ada kontradiksi logis jika indikator dipahami.

Bahaya muncul ketika satu pihak menggunakan pengalaman anekdotal untuk menolak semua data, atau menggunakan data agregat untuk membatalkan pengalaman. Dialog kebijakan membutuhkan triangulasi: statistik, data administratif, survei subjektif, dan studi kualitatif. Perbedaan menjadi sumber pertanyaan.

Pemerintah perlu menyajikan ketidakpastian dan keterbatasan secara terbuka. Publikasi dashboard yang mudah dipahami, data terpilah, dan konsultasi dapat meningkatkan kepercayaan. Statistik yang kredibel tidak hanya akurat, tetapi relevan terhadap pertanyaan masyarakat.

Analisis Sektoral dan Institusional

1. Pertanian: Pertumbuhan Produksi versus Pendapatan Petani

Pertumbuhan produksi pertanian tidak selalu meningkatkan pendapatan petani. Hasil panen dapat naik karena cuaca baik, perluasan lahan, atau input lebih banyak, tetapi harga jual turun ketika pasokan melimpah. Petani kecil menghadapi struktur pasar yang tidak seimbang: banyak penjual berhadapan dengan sedikit pembeli, keterbatasan penyimpanan, kebutuhan uang tunai, dan informasi harga yang tidak sempurna. PDB sektor meningkat berdasarkan volume dan nilai tambah, sementara pendapatan bersih petani tertekan oleh pupuk, benih, tenaga kerja, sewa lahan, dan biaya transportasi.

Kesejahteraan petani juga bergantung pada risiko. Satu musim yang baik tidak menghapus ketidakpastian cuaca, penyakit, harga, dan utang. Asuransi, irigasi, riset, penyuluhan, dan diversifikasi pendapatan berfungsi sebagai infrastruktur ketahanan. Tanpa itu, rumah tangga cenderung menghindari investasi produktif atau menjual aset setelah guncangan.

Rantai nilai menentukan distribusi. Pengolahan, merek, logistik, dan ritel sering menikmati margin lebih tinggi daripada produsen primer. Koperasi atau organisasi produsen dapat meningkatkan posisi tawar, tetapi memerlukan tata kelola. Kontrak pertanian dapat memberi kepastian namun juga menciptakan ketergantungan bila syarat tidak seimbang.

Strategi pertanian yang menyejahterakan harus mengukur pendapatan bersih, terms of trade, produktivitas lahan dan tenaga kerja, stabilitas, gizi, serta regenerasi petani. Pertumbuhan output hanyalah salah satu bagian. Agroindustri lokal, akses pasar, dan layanan dasar desa membantu mengubah produksi menjadi kualitas hidup.

2. Manufaktur: Mengapa Industrialisasi Penting bagi Kelas Menengah

Manufaktur historis penting karena mampu menyerap pekerja dengan pendidikan menengah, menghasilkan skala, mendorong pembelajaran, dan menciptakan rantai pemasok. Pekerjaan pabrik formal sering

menyediakan upah lebih stabil daripada pekerjaan informal. Ketika kontribusi manufaktur stagnan atau teknologi menjadi sangat padat modal, jalur pembentukan kelas menengah menyempit.

Namun tidak semua industri menyejahterakan. Pabrik dengan upah rendah, kontrak pendek, keselamatan buruk, dan sedikit transfer keterampilan dapat menghasilkan ekspor tanpa mobilitas. Industri ekstraktif yang hanya melakukan proses awal mungkin memiliki linkage terbatas. Kebijakan harus menilai kompleksitas produk, kandungan lokal, pelatihan, inovasi, energi, dan lingkungan.

Upgrading memerlukan ekosistem: logistik, listrik, standar, riset, vokasi, pembiayaan, dan kepastian regulasi. Insentif yang hanya didasarkan nilai investasi dapat mendorong proyek besar tetapi tidak membangun kemampuan. Performance-based incentives mengaitkan dukungan dengan ekspor, pekerjaan, R&D, pemasok, dan emisi.

Manufaktur modern juga berinteraksi dengan jasa: desain, perangkat lunak, logistik, keuangan, dan maintenance. Batas sektor semakin kabur. Tujuannya bukan romantisasi pabrik, tetapi membangun aktivitas tradable produktif yang menciptakan karier dan pendapatan luas.

3. Sektor Jasa: Dari Jasa Produktif hingga Jasa Survival

Sektor jasa sering menjadi penyumbang pertumbuhan dan pekerjaan. Namun jasa sangat heterogen. Teknologi informasi, jasa profesional, keuangan, kesehatan, dan logistik dapat memiliki produktivitas tinggi. Pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, dan jasa personal informal sering berproduktivitas rendah. Pertumbuhan jasa tidak otomatis menunjukkan transformasi yang baik.

Sebagian pekerjaan jasa berfungsi sebagai penampung tenaga kerja yang tidak terserap sektor produktif. Orang bekerja karena tidak memiliki jaminan pengangguran, bukan karena peluang menghasilkan pendapatan layak. Statistik mencatat mereka bekerja, tetapi jam, pendapatan, dan keamanan rendah. Fenomena ini menjelaskan pengangguran terbuka yang rendah namun kesejahteraan lemah.

Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas jasa, tetapi juga menstandarisasi dan memantau pekerja. Platform mempertemukan permintaan dan penawaran, namun komisi, algoritma, dan reputasi menentukan pembagian. Tanpa perlindungan, fleksibilitas dibayar dengan risiko yang dialihkan kepada pekerja.

Kebijakan jasa perlu spesifik. Jasa modern memerlukan talenta dan ekspor; jasa sosial memerlukan investasi publik; jasa informal memerlukan upgrading dan perlindungan. Menganggap seluruh jasa sama akan menyesatkan analisis struktural.

4. Sumber Daya Alam dan Kutukan Kelimpahan

Daerah kaya sumber daya dapat memiliki PDRB tinggi tetapi indikator sosial tertinggal. Industri tambang menghasilkan nilai besar dengan tenaga kerja terbatas, volatilitas harga, dan dampak lingkungan. Pendapatan publik dapat meningkat, tetapi kualitas belanja dan kapasitas institusi menentukan hasil. Bila penerimaan digunakan untuk proyek prestise, konsumsi birokrasi, atau patronase, kesejahteraan jangka panjang tidak terbentuk.

Dutch disease dapat terjadi ketika boom sumber daya meningkatkan kurs riil atau biaya lokal, melemahkan sektor tradable lain. Tenaga kerja dan modal pindah ke aktivitas terkait boom, sementara pertanian dan manufaktur kesulitan. Ketika harga jatuh, ekonomi daerah rapuh.

Hilirisasi menawarkan peluang, tetapi harus dinilai dari nilai tambah bersih. Pengolahan yang boros energi, bergantung teknologi asing, atau memberi insentif besar mungkin menghasilkan manfaat fiskal dan tenaga

kerja lebih kecil daripada headline. Analisis harus memasukkan biaya energi, air, lingkungan, dan opportunity cost.

Resource revenue perlu dikelola melalui transparansi, dana stabilisasi, investasi manusia, dan diversifikasi. Masyarakat lokal harus memperoleh akses pekerjaan, usaha, layanan, dan pemulihan lingkungan. Kelimpahan menjadi berkah hanya bila diubah menjadi aset produktif yang bertahan setelah sumber habis.

5. Pembangunan Infrastruktur dan Distribusi Manfaat

Infrastruktur dapat menaikkan PDB melalui konstruksi dan meningkatkan produktivitas melalui konektivitas. Namun manfaat bergantung pada penggunaan, tarif, lokasi, dan integrasi. Jalan tol dapat mempercepat logistik perusahaan tetapi kurang bermanfaat bagi warga tanpa kendaraan. Bandara baru dapat meningkatkan aset tetapi sepi. Proyek yang salah prioritas menghasilkan output konstruksi tanpa public value.

Land value uplift sering dinikmati pemilik lahan. Infrastruktur menaikkan harga di sekitar, sementara penyewa atau usaha kecil tergusur. Land value capture dapat mengembalikan sebagian keuntungan untuk pembiayaan dan perumahan. Perencanaan partisipatif membantu mengurangi displacement.

Biaya pemeliharaan penting. Infrastruktur yang dibangun tanpa anggaran operasi memburuk dan menjadi beban. Life-cycle costing harus dilakukan sebelum persetujuan. Kualitas pengadaan dan desain menentukan keselamatan serta umur.

Evaluasi infrastruktur perlu mengukur waktu tempuh, akses kelompok miskin, biaya logistik, emisi, keselamatan, dan pengembangan wilayah. Jumlah kilometer atau nilai proyek bukan tujuan akhir.

6. Ekonomi Digital dan Kesejahteraan Konsumen

Ekonomi digital dapat meningkatkan surplus konsumen melalui layanan murah, cepat, dan beragam. PDB mungkin tidak sepenuhnya menangkap layanan gratis atau peningkatan kenyamanan. Dalam hal ini, kesejahteraan dapat naik lebih dari angka produksi. Namun situasi dapat berbalik ketika subsidi berakhir, platform terkonsentrasi, atau data digunakan untuk eksploitasi.

Konsumen menikmati harga rendah, tetapi pekerja dan pedagang dapat menanggung tekanan. Efisiensi logistik dan pencarian merupakan manfaat nyata, sedangkan perang harga dapat menghancurkan usaha lokal. Setelah konsolidasi, platform memiliki kekuatan menaikkan komisi. Kebijakan persaingan harus melihat dinamika, bukan harga saat ini saja.

Data menciptakan nilai melalui personalisasi dan iklan. Warga membayar dengan perhatian dan privasi, biaya yang tidak tercermin dalam harga. Kesejahteraan digital memerlukan keamanan, pilihan, transparansi, dan kontrol data.

Indonesia perlu mendorong interoperabilitas, persaingan, perlindungan pekerja, literasi, dan kapasitas UMKM. Digitalisasi yang menyejahterakan meningkatkan produktivitas produsen kecil dan kualitas layanan, bukan hanya transaksi platform.

7. Fiskal, Utang Publik, dan Kesejahteraan Antargenerasi

Belanja defisit dapat mendukung pertumbuhan saat ekonomi lemah dan membiayai investasi. Namun kualitas menentukan apakah utang memperbesar kapasitas pembayaran masa depan. Utang untuk infrastruktur produktif, kesehatan, dan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan; utang untuk pengeluaran rendah manfaat memindahkan beban ke generasi berikutnya.

Rasio utang terhadap PDB penting tetapi tidak cukup. Struktur jatuh tempo, mata uang, bunga, basis investor, dan penerimaan menentukan risiko. Beban bunga bersaing dengan belanja sosial. Ruang fiskal dapat menyempit meskipun ekonomi tumbuh bila penerimaan rendah atau kewajiban meningkat.

Keadilan antargenerasi juga menyangkut aset alam dan iklim. Generasi saat ini dapat menikmati pertumbuhan dengan mengurangi hutan, air, dan stabilitas iklim. Neraca publik perlu memasukkan aset serta liabilitas, bukan utang keuangan saja.

Fiscal incidence analysis menunjukkan siapa membayar pajak dan menerima belanja. Sistem dapat progresif melalui layanan meskipun pajak tidak sangat progresif. Tujuan adalah paket keseluruhan yang meningkatkan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.

8. Kesehatan Mental dan Tekanan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan optimisme, tetapi perubahan cepat juga menciptakan stres. Kompetisi, urbanisasi, ketidakpastian kerja, utang, dan media sosial memengaruhi kesehatan mental. Produktivitas dapat naik sementara burnout dan kecemasan meningkat. PDB tidak mengurangi nilai karena penderitaan psikologis.

Pekerjaan bermutu menyediakan identitas, hubungan, dan kontrol. Pekerjaan dengan pengawasan ketat, jadwal berubah, dan tuntutan tinggi dapat merusak kesehatan meskipun upah sedikit lebih tinggi. Organisasi perlu mengukur well-being dan redesign kerja.

Layanan kesehatan mental masih memiliki hambatan biaya dan stigma. Investasi memberi manfaat ekonomi melalui produktivitas, absensi, dan keluarga. Namun argumen kemanusiaan lebih mendasar: kesehatan mental adalah bagian kesejahteraan.

Kebijakan biaya hidup, perumahan, perlindungan, dan komunitas berpengaruh pada mental. Pendekatan lintas sektor lebih efektif daripada hanya layanan klinis.

9. Demografi, Rumah Tangga, dan Beban Ketergantungan

Bonus demografi dapat mendukung pertumbuhan ketika penduduk usia kerja banyak. Namun manfaat rumah tangga bergantung pada pekerjaan dan layanan. Pengangguran pemuda atau pekerjaan rendah produktivitas mengubah bonus menjadi tekanan. Pendidikan yang lebih tinggi juga menaikkan aspirasi dan biaya kesempatan.

Penuaan penduduk meningkatkan kebutuhan pensiun, kesehatan, dan perawatan. Keluarga kecil memiliki lebih sedikit anggota untuk merawat lansia. PDB dapat terus tumbuh tetapi beban fiskal dan rumah tangga meningkat. Care infrastructure menjadi penting.

Komposisi rumah tangga memengaruhi konsumsi. Pendapatan per kapita nasional tidak menunjukkan biaya membesarkan anak atau merawat lansia. Kebijakan pajak, transfer, dan layanan perlu mempertimbangkan siklus hidup.

Strategi kesejahteraan harus bersifat life-course: gizi awal, pendidikan, transisi kerja, keluarga, reskilling, dan pensiun. Pertumbuhan yang tidak membangun sistem tersebut kehilangan peluang demografi.

10. Politik Persepsi dan Legitimasi Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah narasi politik karena digunakan untuk menilai kinerja. Pemerintah cenderung menonjolkan angka positif, oposisi menonjolkan kesulitan. Polarisasi dapat membuat statistik dipilih secara selektif. Analisis akademik perlu memisahkan fakta, metodologi, dan nilai.

Legitimasi tidak hanya tergantung hasil, tetapi prosedur. Warga lebih menerima kebijakan bila merasa didengar, aturan adil, dan beban dibagi. Proyek yang memberi manfaat agregat dapat ditolak jika kompensasi dan partisipasi buruk. Social license merupakan aset pembangunan.

Komunikasi yang terlalu optimistis berisiko backlash. Mengakui kemajuan dan kekurangan secara bersamaan lebih kredibel. Pemerintah dapat mengatakan ekonomi tumbuh dan kemiskinan turun, sambil mengakui tekanan biaya hidup, wilayah tertinggal, dan pekerjaan rentan.

Legitimasi pertumbuhan akhirnya bergantung pada harapan. Warga bertanya apakah kerja keras memungkinkan kehidupan lebih baik dan apakah anak mereka memiliki peluang. Kebijakan harus menjawab pertanyaan moral ini, bukan hanya angka triwulanan.

Model Kebijakan Terpadu: Growth-to-Welfare Transmission Framework

Kerangka transmisi pertumbuhan-ke-kesejahteraan dapat disusun dalam tujuh lapis. Lapis pertama adalah sumber pertumbuhan: konsumsi, investasi, ekspor, atau belanja pemerintah; serta sektor dan teknologi yang digunakan. Lapis kedua adalah penciptaan pendapatan: upah, keuntungan, pendapatan usaha, dan penerimaan publik. Lapis ketiga adalah distribusi: pembagian menurut desil, gender, wilayah, usia, dan kepemilikan. Lapis keempat adalah harga dan biaya hidup. Lapis kelima adalah layanan dan transfer. Lapis keenam adalah risiko dan aset. Lapis ketujuh adalah outcome manusia serta lingkungan.

Setiap kebijakan dapat dipetakan pada kerangka ini. Misalnya, investasi industri meningkatkan output. Dampaknya pada kesejahteraan tergantung pekerjaan, upah, pemasok, pajak, harga lahan, lingkungan, dan penggunaan penerimaan. Analisis yang berhenti pada output kehilangan enam lapis lain. Kerangka membantu kementerian dan daerah melakukan appraisal lintas sektor.

Kerangka juga menunjukkan bahwa satu kebijakan dapat memiliki efek berlawanan. Infrastruktur menaikkan produktivitas tetapi harga tanah. Subsidi energi menurunkan biaya sekarang tetapi mengurangi ruang fiskal dan memperburuk emisi. Upah tinggi meningkatkan pendapatan tetapi dapat menekan usaha bila produktivitas tidak naik. Kebijakan perlu dinilai sebagai paket dengan mitigasi.

Secara kelembagaan, koordinator ekonomi perlu bekerja dengan bidang sosial, lingkungan, ruang, dan daerah. Data harus dapat dihubungkan tanpa mengabaikan privasi. Evaluasi independen dan partisipasi memperkuat pembelajaran. Kerangka bukan rumus mekanis, tetapi disiplin untuk bertanya lebih lengkap.

Balanced Scorecard Pertumbuhan yang Menyejahterakan

Perspektif	Tujuan	Contoh Indikator	Risiko jika Diabaikan
Makro	Stabilitas dan kapasitas produksi	PDB, inflasi, investasi, produktivitas	Krisis atau stagnasi

Pekerjaan	Pendapatan luas dan aman	Upah riil median, formalitas, underemployment	Working poor
Distribusi	Manfaat tersebar	Gini, growth by decile, labor share	Polarisasi
Biaya Hidup	Keterjangkauan kebutuhan	Pangan, sewa, transportasi, layanan	Pendapatan riil tergerus
Kapabilitas	Kesehatan dan pendidikan	IPM, hasil belajar, akses kesehatan	Mobilitas rendah
Aset dan Risiko	Ketahanan rumah tangga	Tabungan, rumah, jaminan, utang	Kerentanan
Wilayah	Konvergensi kesempatan	Produktivitas dan layanan daerah	Ketimpangan spasial
Lingkungan	Keberlanjutan	Emisi, kualitas udara, aset alam	Kesejahteraan masa depan turun
Kepercayaan	Legitimasi	Kepuasan, persepsi fairness, keluhan	Resistensi sosial

Peta Jalan Implementasi

Tahap I: Diagnosis Nasional dan Daerah

Bangun dashboard yang menggabungkan indikator produksi, median, pekerjaan, biaya hidup, layanan, aset, lingkungan, dan persepsi. Identifikasi sektor serta wilayah dengan pertumbuhan tinggi tetapi outcome lemah. Lakukan review insentif investasi dan belanja.

Tahap II: Quick Wins Kesejahteraan

Fokus pada harga pangan, transportasi, perumahan sewa, layanan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan pekerja. Perbaiki program yang langsung mengurangi biaya rumah tangga. Hubungkan proyek dengan akses dan kelompok sasaran.

Tahap III: Transformasi Produktivitas Luas

Kembangkan manufaktur dan jasa tradable, agroindustri, UMKM, keterampilan, dan teknologi. Bangun rantai pemasok. Insentif dikaitkan dengan pekerjaan, upah, inovasi, dan lingkungan.

Tahap IV: Reformasi Distribusi dan Aset

Perkuat pajak progresif yang efektif, layanan universal, perumahan, tabungan, pensiun, dan akses usaha. Kurangi rente tanah dan monopoli. Perluas kepemilikan aset produktif.

Tahap V: Institusionalisasi Evaluasi Kesejahteraan

Setiap kebijakan besar memiliki distributional and welfare impact assessment. Laporan tahunan pemerintah menyajikan capaian lintas dimensi. Parlemen, akademisi, dan publik menggunakan indikator yang sama untuk akuntabilitas.

Penutup Reflektif

Pertumbuhan ekonomi adalah sarana yang sangat penting, tetapi ia tidak memiliki mekanisme moral otomatis. Pasar menghargai daya beli, kepemilikan, dan kelangkaan, bukan kebutuhan atau keadilan dengan sendirinya. Negara, masyarakat, dan institusi menentukan bagaimana hasil produksi diterjemahkan menjadi kesempatan. Karena itu, debat pertumbuhan versus pemerataan merupakan dikotomi palsu. Pemerataan kesempatan dan keamanan dapat memperkuat pertumbuhan melalui kesehatan, pendidikan, permintaan, dan kepercayaan.

Pertanyaan mengapa pertumbuhan tidak terasa harus dijawab dengan empati dan analisis. Kadang jawabannya adalah manfaat belum merata; kadang harga tertentu naik; kadang ekspektasi berubah; kadang kualitas layanan buruk; dan kadang indikator agregat tidak menangkap dimensi penting. Tidak ada satu penjelasan untuk semua kelompok. Kebijakan yang baik dimulai dengan mendengarkan dan memeriksa data.

Indonesia telah membuat kemajuan nyata dalam pertumbuhan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Mengakui kemajuan tidak berarti puas. Negara berpendapatan menengah menghadapi standar kesejahteraan yang lebih tinggi. Warga tidak hanya ingin bertahan di atas garis kemiskinan, tetapi memiliki rumah, pendidikan bermutu, kesehatan, pekerjaan aman, waktu keluarga, lingkungan bersih, dan masa depan anak. Aspirasi tersebut adalah tanda pembangunan, bukan gangguan terhadap narasi.

Tujuan akhir pembangunan adalah memperluas kebebasan nyata manusia. PDB menyediakan sumber daya, tetapi sumber daya harus diubah menjadi kapabilitas melalui distribusi, layanan, institusi, dan lingkungan. Ketika pertumbuhan dinilai dengan lensa ini, kebijakan menjadi lebih konkret: pekerjaan apa, upah siapa, harga mana, daerah mana, layanan apa, risiko siapa, dan generasi mana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa ekonomi kembali kepada manusia.

Pembelajaran Perbandingan dan Implikasi Manajerial

A. Pertumbuhan yang Pro-Poor, Inklusif, dan Shared Prosperity

Istilah pro-poor growth, inclusive growth, dan shared prosperity memiliki penekanan berbeda. Pertumbuhan pro-poor menilai apakah pendapatan kelompok miskin meningkat, baik secara absolut maupun relatif. Pertumbuhan inklusif menekankan kesempatan partisipasi yang luas dan distribusi manfaat. Shared prosperity berfokus pada kemajuan kelompok bawah distribusi, sering melalui pertumbuhan pendapatan 40 persen terbawah. Ketiganya menggeser pertanyaan dari jumlah output menuju pola distribusi.

Perbedaan definisi memiliki konsekuensi. Pertumbuhan dapat pro-poor secara absolut karena pendapatan kelompok miskin naik, tetapi ketimpangan meningkat karena kelompok kaya naik jauh lebih cepat. Sebaliknya, ketimpangan dapat turun pada saat semua kelompok mengalami stagnasi. Kebijakan perlu

menetapkan tujuan berlapis: pertumbuhan total yang memadai, kenaikan pendapatan bawah, mobilitas, dan keberlanjutan.

Dalam konteks Indonesia, garis kemiskinan resmi penting untuk menargetkan kebutuhan dasar, tetapi strategi kelas menengah memerlukan ukuran lebih tinggi. Rumah tangga rentan yang sedikit di atas garis membutuhkan pekerjaan, jaminan, dan layanan. Pendekatan spektrum menghindari cliff effect, ketika dukungan hilang segera setelah seseorang melewati batas administratif.

Manajemen pembangunan dapat menggunakan target ganda: PDB, produktivitas, upah median, kemiskinan, kerentanan, dan kualitas kerja. Target tidak harus menghasilkan satu indeks; dashboard memungkinkan trade-off terlihat. Pimpinan bertanggung jawab menjelaskan keputusan ketika indikator bergerak berbeda.

B. Capability Approach dan Makna Kehidupan Layak

Pendekatan kapabilitas Amartya Sen membedakan sumber daya dari kemampuan nyata. Dua orang dengan pendapatan sama dapat memiliki kemampuan berbeda karena kesehatan, disabilitas, lokasi, diskriminasi, atau tanggungan. Kesejahteraan bukan hanya memiliki barang, tetapi mampu menjadi dan melakukan sesuatu yang bernilai: sehat, berpendidikan, berpartisipasi, aman, dan memiliki pilihan.

Pendekatan ini menjelaskan mengapa transfer pendapatan saja belum cukup. Sekolah tersedia tetapi kualitas rendah, fasilitas kesehatan jauh, transportasi tidak aman, atau diskriminasi menghambat penggunaan. Conversion factors menentukan bagaimana pendapatan berubah menjadi kehidupan. Kebijakan perlu memperhatikan lingkungan fisik, sosial, dan personal.

Kapabilitas juga mengakui agency. Masyarakat bukan penerima pasif. Partisipasi dalam menentukan prioritas merupakan bagian kesejahteraan. Proyek dapat menaikkan pendapatan tetapi mengurangi kontrol atas tanah atau komunitas. Penilaian harus mempertimbangkan kebebasan proses dan hasil.

Dalam perencanaan, pendekatan kapabilitas dapat diterjemahkan melalui outcome serta suara warga. Indikator pendidikan tidak hanya pendaftaran, tetapi kemampuan; kesehatan tidak hanya fasilitas, tetapi kondisi; pekerjaan tidak hanya status, tetapi keamanan dan otonomi. Hal ini memperdalam meaning dari growth-to-welfare.

C. Social Minimum, Universalism, dan Targeting

Perlindungan kesejahteraan menghadapi pilihan antara layanan universal dan bantuan tertarget. Targeting mengarahkan sumber daya pada yang paling membutuhkan, tetapi menghadapi kesalahan data, stigma, biaya administrasi, dan exclusion. Universalism membangun dukungan luas dan akses sederhana, tetapi lebih mahal serta dapat memberi manfaat kepada kelompok mampu.

Kombinasi sering optimal. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air, dan perlindungan tertentu dapat universal, sedangkan bantuan tambahan ditargetkan. Progressive universalism memperluas kualitas untuk semua sambil memberi dukungan lebih kepada kelompok lemah. Desain harus mempertimbangkan kapasitas negara.

Pertumbuhan tanpa kesejahteraan dapat terjadi ketika layanan publik untuk kelas menengah buruk sehingga mereka membeli privat, sementara kelompok miskin menerima layanan minimal. Sistem tersegmentasi melemahkan dukungan politik untuk kualitas universal. Integrasi layanan dapat meningkatkan solidaritas dan efisiensi.

Data sosial ekonomi membantu targeting, tetapi keputusan harus memiliki koreksi. Dynamic inclusion diperlukan karena rumah tangga berubah. Mekanisme on-demand application dan grievance mencegah daftar menjadi tertutup. Teknologi mendukung, tetapi verifikasi manusia serta pemerintah lokal tetap penting.

D. Kebijakan Upah, Produktivitas, dan Formalisasi

Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja tercakup, tetapi dampaknya tergantung produktivitas, penegakan, dan struktur usaha. Upah terlalu rendah mempertahankan model bisnis produktivitas rendah; kenaikan terlalu cepat tanpa dukungan dapat mendorong informalitas atau pengurangan kerja. Kebijakan harus dipadukan dengan investasi teknologi, keterampilan, dan akses pembiayaan.

Formalisasi seharusnya merupakan pertukaran nilai. Usaha membayar pajak dan memenuhi standar, sementara memperoleh perlindungan hukum, pembiayaan, pasar, layanan, dan kemudahan. Jika formalitas hanya biaya, usaha tetap informal. Simplifikasi regulasi harus disertai manfaat.

Pekerja informal juga membutuhkan perlindungan tanpa menunggu formalitas sempurna. Jaminan berbasis individu, subsidi kontribusi, dan mekanisme sederhana dapat memperluas cakupan. Organisasi pekerja informal membantu representasi.

Produktivitas tingkat perusahaan dipengaruhi manajemen. Banyak program fokus mesin atau modal, tetapi praktik operasi, kualitas, pemasaran, dan SDM penting. Extension services bagi UMKM dapat memberi dampak besar. Institusi pendidikan manajemen berperan dalam upgrading.

E. Perumahan sebagai Mesin Ketimpangan

Perumahan memiliki dua fungsi: tempat tinggal dan aset. Ketika pasokan di lokasi produktif terbatas, harga naik. Pemilik memperoleh kekayaan, penyewa membayar lebih, dan pendatang berpendapatan rendah tinggal jauh. Pertumbuhan kota meningkatkan nilai tanah, tetapi distribusinya sangat tidak merata.

Kredit rumah membantu permintaan, tetapi jika pasokan tidak elastis, subsidi dapat menaikkan harga. Kebijakan perlu mengatasi tata ruang, perizinan, kepadatan, infrastruktur, perumahan sewa, dan land banking. Perumahan sosial harus terhubung transportasi dan pekerjaan.

Ketimpangan perumahan berdampak antargenerasi. Keluarga pemilik dapat membantu uang muka anak, sedangkan yang lain tertinggal. Harga rumah terhadap pendapatan menjadi indikator penting kesejahteraan kelas muda. PDB per kapita tinggi tidak menjamin keterjangkauan.

Pajak properti dan land value capture dapat mendanai layanan serta mengurangi spekulasi. Namun administrasi nilai dan politik sulit. Transparansi kepemilikan serta data pasar memperbaiki kebijakan.

F. Pangan, Gizi, dan Kualitas Konsumsi

Kesejahteraan tidak hanya ditentukan jumlah kalori. Kualitas diet, protein, mikronutrien, keamanan pangan, dan keragaman menentukan kesehatan. Rumah tangga yang tertekan harga dapat mempertahankan kalori dengan makanan murah tetapi menurunkan gizi. Statistik pengeluaran mungkin tidak sepenuhnya menangkap kualitas.

Pertumbuhan pendapatan biasanya mengubah diet, tetapi pasokan, edukasi, dan lingkungan pangan menentukan. Urbanisasi meningkatkan konsumsi makanan olahan. Penyakit tidak menular dapat naik meski kekurangan gizi belum selesai. Indonesia menghadapi double burden.

Kebijakan pangan perlu mengintegrasikan produksi, distribusi, harga, keamanan, dan gizi. Subsidi komoditas tunggal dapat menstabilkan kalori tetapi tidak keragaman. Program sekolah, kesehatan ibu-anak, sanitasi, dan pendidikan saling melengkapi.

Gizi merupakan jembatan pertumbuhan jangka panjang. Stunting dan anemia mengurangi pembelajaran serta produktivitas. Investasi awal memberi return tinggi, tetapi manfaat muncul kemudian. Politik anggaran harus mampu menghargai horizon panjang.

G. Kesejahteraan Subjektif dan Objektif

Indikator objektif seperti pendapatan dan kesehatan penting, namun kesejahteraan subjektif mengukur evaluasi hidup, emosi, dan makna. Pendapatan berkorelasi tetapi tidak menjelaskan semua. Hubungan, keamanan, kepercayaan, lingkungan, dan kesehatan mental berpengaruh.

Survei subjektif menghadapi perbedaan budaya dan adaptasi. Orang dapat menyesuaikan aspirasi pada kondisi buruk, atau merasa tidak puas meski objektif membaik. Karena itu, indikator subjektif melengkapi, bukan menggantikan. Perbedaan antara keduanya memberi sinyal.

Jika pendapatan naik tetapi kepuasan turun, pemerintah perlu memeriksa waktu, stres, ketimpangan, dan lingkungan. Jika kepuasan tinggi meski layanan rendah, standar hak tetap tidak boleh diturunkan. Kebijakan berlandaskan nilai normatif serta pengalaman.

Kesejahteraan subjektif dapat dipakai pada evaluasi kota, pekerjaan, dan layanan. Pertanyaan sederhana mengenai kepuasan, kecemasan, dan harapan memberi informasi cepat. Data terpilah membantu memahami kelompok.

H. Manajemen Kinerja Pemerintah yang Berorientasi Outcome

Birokrasi sering mengukur penyerapan anggaran dan output karena mudah diaudit. Outcome lebih sulit dan dipengaruhi banyak pihak. Namun tanpa outcome, organisasi mengoptimalkan aktivitas. Jalan dibangun meski akses tidak membaik; pelatihan dilakukan meski pekerjaan tidak diperoleh.

Outcome budgeting memerlukan theory of change, baseline, target, dan evaluasi. Indikator harus cukup dekat dengan program tetapi bermakna. Attribution tidak selalu sempurna; contribution analysis dapat digunakan. Manajemen perlu menerima ketidakpastian.

Insentif juga penting. Target tunggal dapat dimanipulasi. Balanced measures, audit kualitas, dan narasi mengurangi gaming. Frontline perlu dilibatkan karena mereka memahami implementasi. Feedback warga menjadi data kinerja.

Kepemimpinan harus bersedia menghentikan program. Sunk cost dan reputasi membuat program bertahan meski lemah. Sunset clauses, pilot, dan evaluasi independen meningkatkan disiplin. Kegagalan yang diakui adalah pembelajaran, bukan selalu skandal.

I. Peran Perguruan Tinggi dan IBM-ASMI

Perguruan tinggi dapat membantu menjembatani indikator makro dan realitas mikro melalui riset, pengajaran, dan pengabdian. Mahasiswa manajemen perlu memahami bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya profit, tetapi stakeholder value. Analisis sektor, rantai nilai, dan dampak sosial memperluas kompetensi.

IBM-ASMI dapat mengembangkan studi kasus Indonesia mengenai upah, UMKM, pelayanan, produktivitas, dan daerah. Program eksekutif dapat membantu pimpinan merancang balanced scorecard dan inclusive business. Kolaborasi dengan pemerintah serta perusahaan menghasilkan data nyata.

Riset aksi memungkinkan dosen dan mahasiswa mendampingi UMKM, mengukur perubahan, dan memperbaiki intervensi. Pengabdian bukan kegiatan terpisah, tetapi laboratorium pembangunan. Hasil dapat masuk kurikulum.

Perguruan tinggi juga menjaga ruang kritik. Ia perlu independen dari narasi pemerintah maupun pasar, sambil tetap konstruktif. Statistik diuji, pengalaman didengar, dan solusi dirancang. Peran ini penting bagi legitimasi pembangunan.

J. Etika Pertumbuhan dan Tanggung Jawab Antarwaktu

Ekonomi membahas efisiensi, tetapi pembangunan juga menyangkut etika. Siapa yang harus menanggung biaya transisi? Berapa kompensasi yang adil? Apakah generasi sekarang boleh menghabiskan aset alam? Apakah pekerjaan yang tidak bermartabat dapat dibenarkan demi pertumbuhan? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab model teknis saja.

Prinsip utilitarian menilai total manfaat, tetapi dapat mengorbankan minoritas. Prinsip hak menetapkan batas. Prinsip keadilan memeriksa distribusi. Kebijakan publik perlu menggabungkan. Social impact assessment harus mengenali kelompok kecil dengan kerugian besar.

Kompensasi tidak selalu cukup. Kehilangan komunitas, budaya, atau ekosistem mungkin tidak dapat diganti uang. Avoidance hierarchy mendahulukan menghindari, meminimalkan, memulihkan, baru mengompensasi. Partisipasi menentukan legitimasi.

Tanggung jawab antarwaktu menuntut discount rate yang etis. Manfaat sekarang sering lebih dihargai daripada kerusakan masa depan. Untuk iklim dan biodiversitas, keputusan perlu menjaga option value dan batas ekologis. Pertumbuhan harus kompatibel dengan kehidupan generasi mendatang.

Rekomendasi Prioritas

Pertama, pemerintah perlu menetapkan pertumbuhan upah riil median dan penciptaan pekerjaan formal produktif sebagai target utama bersama pertumbuhan PDB. Target sektoral harus mencantumkan jumlah pekerjaan, jenjang keterampilan, partisipasi perempuan, dan linkage UMKM.

Kedua, kembangkan indeks biaya hidup esensial menurut kelompok pendapatan dan wilayah. Gunakan indeks untuk menilai kecukupan upah, bantuan, dan kebijakan harga. Data sewa, pengasuhan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan perlu diperkuat.

Ketiga, lakukan welfare and distributional impact assessment untuk proyek, subsidi, dan reformasi besar. Analisis harus memetakan kelompok penerima, pembayar, dampak harga, lingkungan, dan risiko. Ringkasan publik meningkatkan akuntabilitas.

Keempat, perbaiki kualitas layanan universal agar rumah tangga tidak membeli layanan privat mahal. Fokus pada hasil belajar, keselamatan pasien, air, sanitasi, transportasi, dan layanan anak. Pemerataan mutu adalah instrumen redistribusi.

Kelima, bangun kebijakan perumahan dan tata ruang nasional yang menghubungkan pasokan hunian, transit, pajak tanah, dan pekerjaan. Keterjangkauan bagi generasi muda harus menjadi indikator pembangunan kota.

Keenam, perluas sistem perlindungan sosial adaptif dan portabel untuk pekerja formal maupun informal. Integrasikan bantuan, asuransi pengangguran, kesehatan, pelatihan, dan layanan penempatan. Mekanisme pendaftaran serta pengaduan harus sederhana.

Ketujuh, dorong produktivitas UMKM melalui layanan manajemen, teknologi, standar, logistik, dan pasar. Ukur peningkatan laba, upah, dan ketahanan, bukan jumlah peserta program.

Kedelapan, gunakan penerimaan sumber daya dan keuntungan boom untuk diversifikasi, manusia, serta dana stabilisasi. Daerah harus memiliki transparansi manfaat dan rencana pascatambang.

Kesembilan, perkuat kompetisi dan kurangi rente pada lahan, logistik, pangan, digital, dan input usaha. Persaingan sehat menurunkan biaya hidup dan memperluas peluang.

Kesepuluh, terbitkan Laporan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Inklusif tahunan yang menyajikan kemajuan, kesenjangan, serta tindakan korektif. Laporan harus mudah dipahami dan melibatkan BPS, akademisi, daerah, serta masyarakat.

Coda: Ketika Angka Makro Bertemu Kehidupan Mikro

Angka makro diperlukan karena negara tidak dapat dikelola hanya dengan cerita individual. Namun kehidupan mikro diperlukan karena pembangunan tidak ditujukan kepada angka. Ketegangan antara keduanya bukan masalah yang harus dihilangkan, melainkan jembatan yang harus dibangun. Statistik memberi peta; pengalaman memberi tekstur medan. Kebijakan membutuhkan keduanya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar lima persen selama bertahun-tahun menunjukkan ketahanan. Penurunan kemiskinan dan kenaikan IPM menunjukkan manfaat. Namun tahap pembangunan berikutnya menuntut kualitas lebih tinggi. Warga membandingkan bukan hanya dengan masa lalu, tetapi dengan potensi, biaya, dan negara lain. Pemerintah perlu merespons aspirasi ini dengan reformasi produktivitas dan kesejahteraan.

Pertumbuhan tanpa kesejahteraan bukan kondisi biner. Biasanya manfaat ada, tetapi tidak cukup luas, cepat, aman, atau terlihat. Tugas analisis adalah menemukan titik putus transmisi. Apakah pekerjaan? Upah? harga? layanan? aset? wilayah? lingkungan? Jawaban berbeda memerlukan obat berbeda. Slogan tidak dapat menggantikan diagnosis.

Indonesia dapat memilih jalur pertumbuhan yang menyejahterakan dengan memadukan stabilitas makro, transformasi struktural, layanan universal, perlindungan, dan institusi yang adil. Pilihan ini bukan anti-pasar atau anti-investasi. Justru ia menciptakan tenaga kerja sehat, permintaan kuat, kepastian, dan legitimasi yang dibutuhkan pertumbuhan berkelanjutan.

Ukuran akhir keberhasilan sederhana tetapi mendalam: apakah lebih banyak orang memiliki pekerjaan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan tanpa kecemasan, memperoleh layanan bermutu, memiliki waktu dan lingkungan yang sehat, serta percaya bahwa anak mereka dapat hidup lebih baik. Bila jawabannya ya, pertumbuhan telah menjadi pembangunan. Bila belum, pekerjaan kebijakan belum selesai.

Lampiran Konseptual: Dua Puluh Indikator yang Perlu Dibaca Bersama

1. Pertumbuhan PDB riil

Menunjukkan perubahan volume produksi. Penting untuk melihat kapasitas ekonomi, tetapi tidak menunjukkan distribusi. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

2. PDB per kapita

Membagi PDB dengan penduduk. Berguna untuk perbandingan, tetapi merupakan rata-rata. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

3. Pendapatan atau konsumsi median

Menggambarkan posisi tengah dan lebih dekat pada pengalaman masyarakat luas. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

4. Pertumbuhan menurut desil

Menunjukkan kelompok mana yang memperoleh kemajuan paling cepat. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

5. Gini ratio

Mengukur ketimpangan distribusi, tetapi perlu dilengkapi ketimpangan aset. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

6. Tingkat kemiskinan

Mengukur penduduk di bawah garis kebutuhan minimum. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

7. Kerentanan kemiskinan

Menangkap penduduk dekat garis yang mudah jatuh miskin. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

8. Upah riil median

Mengukur daya beli upah pekerja di tengah distribusi. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

9. Labor share

Menilai bagian nilai tambah yang diterima tenaga kerja. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

10. Tingkat pengangguran

Menunjukkan pencari kerja yang belum bekerja, tetapi tidak menangkap kualitas. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

11. Underemployment

Mengukur kekurangan jam atau pemanfaatan kemampuan. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

12. Formalitas dan perlindungan

Menilai keamanan kontrak, jaminan, dan hak. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

13. Produktivitas tenaga kerja

Menunjukkan output per pekerja atau jam. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

14. Indeks biaya hidup esensial

Mengukur pangan, sewa, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

15. Keterjangkauan perumahan

Membandingkan harga atau sewa dengan pendapatan. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

16. Akses dan mutu layanan

Mengukur hasil pendidikan, kesehatan, air, dan transportasi. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

17. Kepemilikan aset dan utang

Menilai ketahanan serta distribusi kekayaan. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

18. Time use

Mengukur waktu kerja, perjalanan, perawatan, dan istirahat. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

19. Kualitas lingkungan

Mengukur udara, air, emisi, dan aset alam. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

20. Kesejahteraan subjektif

Menilai kepuasan hidup, kecemasan, kepercayaan, dan harapan. Indikator ini tidak boleh dibaca sendirian. Perubahan dapat dipengaruhi siklus ekonomi, struktur demografi, kebijakan, dan metode. Analisis tren, perbandingan wilayah, serta data terpilah memberi makna yang lebih kuat.

Pertanyaan untuk Diskusi Akademik dan Manajerial

Apakah pertumbuhan lima persen yang disertai upah riil stagnan dapat disebut berhasil? Jawabannya bergantung pada horizon, distribusi, dan sumber pertumbuhan. Jika investasi membangun kapasitas yang segera menghasilkan pekerjaan, stagnasi sementara mungkin dapat dipahami. Jika berulang, transmisi perlu diperbaiki.

Apakah penurunan kemiskinan cukup untuk menyatakan kesejahteraan naik? Penurunan adalah kemajuan penting, tetapi kesejahteraan lebih luas. Kerentanan, kualitas kerja, layanan, aset, dan aspirasi kelas menengah harus dilihat.

Apakah ketimpangan selalu buruk bagi pertumbuhan? Perbedaan imbal hasil dapat memberi insentif, tetapi ketimpangan tinggi dapat membatasi kesempatan, permintaan, kepercayaan, dan stabilitas. Persoalannya adalah sumber, tingkat, dan mobilitas.

Apakah subsidi merupakan jawaban biaya hidup? Subsidi dapat melindungi dalam krisis, tetapi subsidi luas mahal dan dapat menghambat reformasi pasokan. Kombinasi bantuan tertarget dan solusi struktural lebih berkelanjutan.

Apakah hilirisasi otomatis menyejahterakan? Hilirisasi meningkatkan nilai tambah, tetapi outcome tergantung pekerjaan, pajak, kepemilikan, teknologi, energi, lingkungan, dan linkage. Evaluasi harus spesifik.

Apakah digitalisasi meningkatkan kesejahteraan? Ya ketika meningkatkan produktivitas, akses, dan pilihan; tidak bila menciptakan monopoli, pengawasan, ketergantungan, dan pekerjaan rentan tanpa perlindungan.

Bagaimana peran manajemen perusahaan? Perusahaan menentukan desain kerja, upah, pemasok, investasi keterampilan, dan pembagian produktivitas. Inclusive business bukan filantropi, tetapi model nilai bersama.

Bagaimana peran universitas? Universitas menghasilkan bukti, talenta, kritik, dan inovasi. Ia dapat mengukur dampak serta mendampingi pemerintah dan usaha untuk menghubungkan pertumbuhan dengan outcome.

Apakah kesejahteraan subjektif dapat dijadikan target? Ia layak menjadi indikator pelengkap, tetapi kebijakan juga harus menjaga hak dan standar objektif. Ketidakpuasan bukan satu-satunya ukuran, dan adaptasi pada kondisi buruk bukan keberhasilan.

Apa indikator paling penting? Tidak ada satu indikator. Dashboard kecil yang seimbang lebih baik daripada indeks yang menyembunyikan trade-off. PDB, median, upah, kemiskinan, kualitas kerja, biaya hidup, layanan, dan lingkungan merupakan inti.

Pernyataan Akhir

Pertumbuhan ekonomi tanpa kenaikan kesejahteraan dapat terjadi karena output dan kehidupan manusia dihubungkan oleh banyak institusi. Produksi harus menjadi pendapatan; pendapatan harus mengalahkan harga; pekerjaan harus memberi keamanan; pajak harus menjadi layanan; aset harus dapat diakses; dan lingkungan harus tetap menopang kehidupan. Kegagalan pada satu atau beberapa jembatan menghasilkan paradoks.

Paradoks tersebut bukan argumen untuk menolak pembangunan ekonomi. Negara dengan pertumbuhan rendah akan kesulitan menciptakan pekerjaan, meningkatkan penerimaan, dan memenuhi aspirasi. Namun mengejar pertumbuhan tanpa memeriksa mutu dapat menghasilkan ekonomi besar dengan rasa aman kecil. Strategi yang tepat adalah memperkuat kapasitas produksi sekaligus membangun mekanisme pembagian.

Indonesia telah memiliki dasar penting: pasar besar, sumber daya, demografi, institusi makro, dan kemajuan sosial. Tantangannya mengubah ketahanan menjadi transformasi produktivitas yang luas. Itu memerlukan pekerjaan bermutu, kota terjangkau, pendidikan dan kesehatan efektif, UMKM naik kelas, lingkungan terjaga, serta tata kelola yang mengurangi rente.

Dengan demikian, pertanyaan 'mengapa bisa terjadi?' harus diikuti pertanyaan 'bagaimana memperbaikinya?'. Jawabannya bukan satu program, melainkan arsitektur pembangunan yang menghubungkan ekonomi makro, sektor, perusahaan, rumah tangga, wilayah, dan generasi. Ketika hubungan itu kuat, pertumbuhan tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi terasa dalam kehidupan.

Implikasi bagi Pengajaran Manajemen

Topik pertumbuhan dan kesejahteraan penting bagi pendidikan manajemen karena keputusan perusahaan ikut menentukan bagaimana nilai tambah dibagi. Mahasiswa perlu memahami bahwa strategi biaya, otomasi, outsourcing, penetapan upah, pengadaan, lokasi, dan hubungan pemasok mempunyai dampak sosial. Analisis bisnis yang hanya menghitung laba dapat mengabaikan biaya yang dipindahkan kepada pekerja, komunitas, konsumen, atau lingkungan. Konsep stakeholder management, shared value, ESG, dan business ethics menjadi konkret ketika dihubungkan dengan distribusi manfaat pertumbuhan.

Studi kasus dapat meminta mahasiswa membandingkan dua perusahaan dengan pertumbuhan penjualan sama tetapi pola kesejahteraan berbeda. Perusahaan pertama meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, menaikkan upah, mengembangkan pemasok, dan mengurangi limbah. Perusahaan kedua menekan biaya melalui kontrak rentan, monopsoni pemasok, dan eksternalisasi lingkungan. PDB mungkin mencatat kontribusi keduanya, tetapi public value berbeda. Mahasiswa belajar bahwa kualitas strategi memerlukan horizon dan indikator luas.

Pengajaran juga perlu memasukkan data. Mahasiswa dapat membaca PDB, Gini, kemiskinan, upah, inflasi, dan IPM bersama-sama, lalu menghubungkan dengan wawancara atau observasi. Latihan ini mencegah dua ekstrem: teknokrasi yang mengabaikan manusia dan anekdot yang menolak statistik. Kemampuan triangulasi sangat penting bagi manajer dan pembuat kebijakan.

IBM-ASMI dapat menjadikan topik ini sebagai jembatan antara ekonomi, strategi, SDM, pemasaran, operasi, keuangan, dan kebijakan publik. Pertumbuhan yang menyejahterakan memerlukan organisasi yang produktif sekaligus adil. Lulusan manajemen harus mampu merancang sistem kinerja yang menggabungkan profitabilitas, produktivitas, kualitas kerja, kepuasan pelanggan, inovasi, dan dampak sosial.

Pada tingkat kepemimpinan, pelajaran terpenting adalah bahwa angka harus memiliki pemilik moral. Ketika manajer melaporkan efisiensi, ia perlu menjelaskan siapa yang menanggung biaya. Ketika pemerintah melaporkan pertumbuhan, ia perlu menjelaskan transmisi. Akuntabilitas semacam ini bukan kelemahan, tetapi dasar kepercayaan dan keberlanjutan.